



ICON IMAD III

INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ISLAM IN MALAY WORLD

*Theme : "The progress Islam; Achievements,
Challenges and Strategies Ahead"*

BANDUNG, 29-31 OKTOBER 2013

PROSIDING

Editor : Yadi Janwari, Dindin Jamaluddin dan lu Rusliana



**PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
dan
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI MALAYA (APIUM)**

JUDUL MATERI DAN PENULIS	Hal
BIDANG POLITIK	65 -123
Dr. Lukman Thaib, Bara' Barakat Hamad al-Gharibeh, Zaidi Abdul Rahman (Rashid al-Ghannoushi's Thought On Islamic Democracy)	
Dr. Bharuddin Che Pa, MA & Dr. Farizah Zulkifli (Pengasingan Kuasa Menurut Perspektif Barat dan Islam; Kajian Amalannya di Malaysia)	
M Taufiq Rahman, Ph.D (Politik Identitas Islam di Indonesia; Menelusuri Politik Kebangsaan dan Politik Ekonomi Islam di Indonesia)	
Drs.H. Wawan Hernawan, M.Ag (Abdul Halim And His Movement (1911-1962)	
Dr. Setia Gumilar, M.Hum (Ulama dan Politik: Kajian Terhadap Gerakan Ulama dalam Pemberantasan Korupsi di Garut tahun 2002-2007)	
BIDANG EKONOMI	124 - 205
Kamaruzaman Noordin, Mohd. Rizal Muwazir @ Mukhazir and AzianMadun (The Commercialisation of Modern Islamic Insurance Providers: A Study of Takaful Business Frameworks in Malaysia)	
Dr. Elis Ratna Wulan, Widya Sari dan Susilo Setiawan (Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Penerimaan Dana Zakat di Kota Bandung)	
Farah Pramudita, M.Si (Green Economy Scenario Sebagai Langkah Kemajuan Sektor Ekonomi Bangsa Muslim Melayu Melalui Optimalisasi Natural Capital Kawasan Transboundary-Heart of Borneo)	
Moch. Noviadi, Nugroho, M.Pd: (Kajian Perspektif Ekonomi Islam dalam Merespon Turbulensi Ekonomi Global)	
Dr.H. Atang Abdul Hakim, MA (Perkembangan Hukum Ekonomi Perbankan Syariah di Indonesia)	
BIDANG PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	206 - 308
Dr. Siti Jamiah Binti Abdul Jalil, MA dan kawan2 (Pengurusan Sekolah Agama Rakyat di Malaysia)	
Dr. Uus Ruswandi, M.Pd (Kontribusi Pendidikan Dalam Pengembangan Karakter Manusia)	

POLITIK IDENTITAS ISLAM DI INDONESIA

(Menelusuri Politik Kebangsaan dan Politik Ekonomi Islam di Indonesia)

Oleh: M. Taufiq Rahman¹

Abstrak

Makalah ini berbicara tentang akar politik identitas Islam di Indonesia yang bermanifes dalam gerakan politik dan ekonomi umat Islam. Dengan metode historis penulis menyatakan bahwa politik identitas Islam di Indonesia itu selalu ada dalam berbagai dinamikanya mengingat proporsi Islam yang masih menjadi mayoritas di negeri ini. Walaupun demikian, penulis beranggapan bahwa politik identitas saja tidak cukup untuk mengaktualkan Islam di Indonesia. Ia mengajukan kepada umat Islam agar membawakan Islam dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh umat, yaitu bahasa pemihakan kepada kaum mustad'afin, politik bersih, dsb. Di sini, Islam mewujudkan bukan hanya bersifat semangat saja, tetapi juga berarti amal (contoh) yang baik.

Abstract

This article talks about the roots of Islamic politics of identity in Indonesia manifested in the Muslims' political and economic movements. By historical method the writer states that Islamic politics of identity in Indonesia always exists in its various dynamics considering the proportion of Islam being the majority in the country. Nevertheless, the writer assumes that only relies on the politics of identity would be not enough in actualizing Islam in the region. He proposes to the Muslims to bring Islam in the language which could be understood by the people (ummat), that is, by such understandable language as leaning to the poor, upholding clean politics, etc. Here, Islam is displayed not only in the spirit, but also in the good example (model).

A. Pendahuluan

John Naisbitt dan Patricia Aburdene dalam *Megatrends 2000* (1990) menyebutkan bahwa "Kaum Fundamentalisme Islam mulai menunjukkan identitas budaya dan agama mereka di Mesir, Indonesia, dan Turki. Semuanya sebagai reaksi terhadap apa yang dipandang sebagai serangan pengaruh Barat."

Ungkapan di atas menyiratkan bahwa identitas keagamaan dapat menimbulkan gerakan politik. Dan untuk kasus kebangkitan identitas Islam berarti harus meniadakan identitas lain yang mengglobal, yaitu Barat. Memang, seperti dikatakan Vatikiotis (1981), pemikiran dan gerakan politik Islam biasanya bermula dari pemikiran tentang perlunya penolakan terhadap Barat.

Memang, secara terminologis, politik identitas sendiri adalah gerakan yang berkepentingan untuk membebaskan diri dari keterpinggiran (*Stanford Encyclopaedia of Philosophy*, 1997). Dan bagi umat Islam, Barat memang telah mengambil alih dominasi dunia sejak mereka menjajah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Untuk itu, demi misi "penyelamatan" itulah umat Islam harus pertamanya menolak Barat.

Setelah penolakan terhadap Barat itulah umat Islam biasanya kembali kepada tradisinya sendiri, yaitu yang berdasarkan teks (nash) al-Qur'an dan al-Sunnah dan kepada sejarahnya sendiri. Inilah yang kemudian disebut sebagai "Islam otentik" (Lee, 1997). Semangat Islam otentik inilah yang selalu membayangi eksistensi umat Islam di dalam kehidupan, termasuk kehidupan politiknya.

Berikut adalah pengalaman Indonesia dalam menyaksikan Islam sebagai identitas politik dan

¹ Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN SGD Bandung.

ekonomi yang mengalami pasang-surut dinamikanya tersendiri. Pengalaman sejarah ini juga dapat memproyeksikan bagaimana identitas Islam dalam kehidupan politik Indonesia di masa-masa yang akan datang. Demikian karena "politik identitas" adalah sesuatu yang "imajiner", "dalam proses", dan sesuatu "menjadi" (*becoming*), bukan sesuatu yang "mewujud" (*being*) (Barker, 2005).

B. Akar Politik Kebangsaan

Andaipun banyak pendapat yang dapat mengeliminasi peran umat Islam dalam perjuangan kebangsaan Indonesia, bagaimanapun fakta membuktikan bahwa umat Islam-lah yang berusaha mengangkat derajat bangsa Indonesia di dunia ini, menjadi negeri yang merdeka dan bangsa yang berdaulat penuh.

Tentunya kita mengenal nama Tuanku Imam Bonjol yang telah berjuang melawan bangsa Belanda pada Perang Paderi di Sumatera Barat. Begitu pula Teuku Umar di Aceh, Pangeran Diponegoro dan Sultan Agung di Jawa, Pangeran Antasari di Kalimantan, Sultan Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo dan Gowa di Sulawesi, dan sebagainya. Mereka berjuang melawan Belanda atas nama Islam dan atas nama bangsa.

Sebegitu lekatnya Islam dengan bangsa di Indonesia, setipis kulit bawang pun tidak menghalangi kesatuan dualisme tadi. Jelasnya, bagi umat Islam Indonesia tidak ada dualisme Islam-Bangsa. Keduanya betul-betul *united* (bersatu). Contohnya adalah dalam menafsirkan pemberontakan petani Banten (1888), Martin van Bruinessen (1995) sempat "kebingungan" menentukan, apakah ini perlawanan karena keislaman atau kebangsaan (?). Karena, keislaman dan kebangsaan betul-betul tidak dapat dipisahkan dalam peristiwa heroik itu.

Dari sudut pandang Antropologi, Clifford Geertz (1960) tidak membagi masyarakat ke dalam Islam atau bukan, karena memang hampir semua yang ditelitinya adalah beragama Islam. Yang terjadi dalam penggolongan masyarakat *ala* Geertz adalah adanya golongan *santri* (yang berbudaya lebih Islami), *priyayi* (lebih aristokrat), dan *abangan* (lebih awam). Dan dalam kesimpulannya, Geertz menyebut bahwa semua mereka adalah beragama, dan agama adalah Islam.

Dalam suasana kemerdekaan pun begitu pula. Orang-orang Islam jelas sekali sifat kebangsaannya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari sinilah Anshari dalam bukunya *Piagam Jakarta* membuat kategori para pejuang kemerdekaan bangsa dengan menyebut *Nasionalis Islami* (untuk menyebut politikus dari kaum santri) dan *Nasionalis Sekuler* (untuk menyebut politikus yang berpendidikan Barat).

Secara praktis, dalam lapangan politik Pemilu tahun 1955 telah menunjukkan bahwa yang dominan di negeri ini adalah empat golongan politik: nasionalis-sekular (PNI), nasionalis-komunis (PKI), nasionalis-santri muda (Masyumi), nasionalis-santri tua (NU). Keempat golongan politik itulah yang memenangkan suara terbanyak Pemilu tahun 1955. Dan apabila ditelusuri, kaum nasionalis sekular tadi sebetulnya berbasis umat Islam dengan pemimpinnya seperti Soekarno. Kemudian, kaum komunisnya sendiri, tetap nasionalis dan tetap Islam, yang dikenal dengan tokoh-tokoh seperti Kyai Misbach dan Hassan Raid. Ini menunjukkan bahwa Islam dan kebangsaan tetap melekat pada umat Islam Indonesia, apapun ideologi politiknya.

Jadi, untuk Indonesia, secara praktis tidak ada pengkategorian atau bahkan pengkutuban keislaman dan kebangsaan. Untuk ini, kita pun dapat setuju dengan Samuel P. Huntington (1996) yang menggeneralisasi orang Arab dan orang Melayu sebagai inti kekuatan peradaban Islam. Ringkasnya, dia menyimpulkan bahwa bangsa Melayu (termasuk di dalamnya Indonesia) adalah orang Islam; atau dapat disebut sebagai "*Melayu itu Islam*."

Walaupun begitu, kecurigaan terhadap Islam itu selalu ada dalam pemikiran para penguasa negara. Di sinilah kemudian muncul ketidakpercayaan umat Islam terhadap pihak yang mencurigainya. Maka, bangsa ini pun menyaksikan terkoyaknya masyarakat ke dalam perpecahan yang menimbulkan pemberontakan-pemberontakan yang mengatasnamakan Islam seperti DI/TII dan PRRI/Permesta (van Dijk, *Islam and Social Discontents in Indonesian History*, 1985). Kejadian sejarah yang menyedihkan itu sangat boleh jadi dikarenakan kecurigaan sementara pihak, sehingga umat Islam pun kemudian tidak percaya lagi pada pemimpin (*ulil amri*) mereka. Jika hal itu terjadi, dimanakah keharmonisan

berbangsa dan bernegara?

Pada masa Pemerintahan Soeharto, identitas Islam yang berlebihan, yang dapat menimbulkan pemberontakan seperti yang sudah-sudah telah diredakan. Partai Islam diminimalkan sampai hanya menjadi satu partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dan gerakan yang akan mendirikan "Negara Islam" disebut sebagai "ekstrem kanan" yang harus ditumpas. Semua hal yang bersifat memunculkan golongan bersifat tabu. Timbullah ketidakbolehan melebih-lebihkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Umat Islam pun mulai membuat gerakan Islam kultural dengan para pemimpinnya seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Amien Rais, dan B.J. Habibie. Tidak heran jika pada masa ini ada yang menyatakan bahwa Islam itu berada di pinggiran (*peripheral*) politik Indonesia (Hefner, 1997).

Namun, Pemerintahan Soeharto pun jatuh pada tahun 1998, dan politik identitas pun kembali menyeruak. Di daerah-daerah, politik ini pun dapat memunculkan peperangan antar warga (bersifat konflik horizontal). Pasukan-pasukan milisi terbentuk, dan kehidupan bernegara pun menjadi terkoyak (Hasan, 2006). Inilah kondisi yang "mengajak kembali masyarakat" (*bringing society back in*) ke dalam kehidupan berbangsa di Indonesia (van Klinken, 2001).

Di lapangan politik kepartaian, muncullah identitas Islam dalam bentuk partai-partai Islam. Dari golongan tua berdirilah Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengklaim penerus ideologi Masyumi, dari pihak Muhammadiyah berdirilah Partai Amanat Nasional (PAN), dari pihak NU berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan dari golongan muda berdirilah Partai Keadilan (PK). Partai-partai lain pun bermunculan dengan mengatasnamakan Islam dan sejarahnya di Indonesia.

Perebutan identitas Islam pun terus bergulir, bahkan termasuk yang menolak politik demokrasi. Penolakan tersebut misalnya datang dari kubu Hizbut Tahrir yang menolak ikut berpolitik partai. Serangan juga dilancarkan di lapangan sosial dan keumatan. Muncullah kelompok Front Pembela Islam (FPI) yang melakukan *sweeping* (penyapuan) terhadap kehidupan yang dilabeli non-Islam seperti diskotik, pelacuran, dan perjudian.

Kehidupan berbangsa di Indonesia memang masih dalam tahap penyesuaian kembali, setelah "masa aman" zaman Soeharto. Orang pun kemudian mencari-cari lagi konsensus (*kalimatun sawaa*) di antara rakyat Indonesia, yang mayoritasnya masih Islam. Ada yang mengembalikan lagi ingatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik dan Bhinneka Tunggal Ika (Empat Pilar). Tetapi usaha dari umat Islam untuk menggali keislaman dan kebangsaan pun dirasa masih kurang. Sehingga kritisisme radikal dari kaum Islam ideologis masih tetap berjaga-jaga (*vigil*).

C. Akar Politik Ekonomi

Jika kita telusuri, dapat ditemukan bahwa umat Islam adalah orang yang mandiri. Hal itu dicontohkan sejak zamannya para Nabi dahulu. Nabi Adam as. adalah orang pertama yang menunjukkan kemandirian dengan cara bertani dan beternak. Yang lain seperti Nabi Ibrahim as. adalah contoh Nabi yang berniaga. Dan yang paling terkenal berdagang adalah Nabi Muhammad Saw. sendiri. Nabi Musa as. lebih memilih beternak daripada harus menggantungkan nasib kepada Fir'aun. Begitulah seterusnya.

Kemandirian dalam perekonomian dapat membebaskan diri dari belenggu-belenggu penjajahan. Dengan jiwa kemandirian, mereka (para nabi itu) dapat bebas bergerak dan berda'wah. Konon kabarnya, ada orang yang menafsirkan tentang kakunya lidah Nabi Musa as. ketika berbicara dengan Fir'aun sehingga harus memakai juru bicara (Nabi Harun as.), itu karena ada rasa kemanusiaan yang berbentuk "kehutangan budi" yang menyelimuti pikiran dan perasaan Nabi Musa as. Dengan begitu, maka kemandirian memang sangat dibutuhkan guna lancarnya da'wah.

Nabi Muhammad Saw pernah ditawarkan kekayaan yang menggiurkan. Tetapi sang Nabi tak tergiur dan menghentikan da'wahnya oleh tawaran itu. Tawaran itu akhirnya ditolak oleh beliau karena memang beliau sendiri adalah orang yang mempunyai perekonomian yang cukup kuat, yakni seorang pedagang yang mandiri.

Selain para nabi, para sahabat pun adalah orang-orang yang mandiri dalam segi perekonomiannya.

Mereka tidak menggantungkan diri kepada para penguasa Arab waktu itu. Kebanyakan mereka adalah orang yang berwirausaha. Abdurrahman bin Auf, contohnya, bisa mengalahkan “konglomerat-konglomerat” para penguasa perekonomian waktu itu, yaitu Yahudi. Demikian pula sahabat-sahabat lain seperti Abu Bakar Shidiq, Usman bin Affan, Mush’ab bin Umair, dan sebagainya. Mereka semua adalah profil Muslim mandiri. Kemandirian perekonomian para teladan (*uswah*) pendahulu diikuti oleh umat Islam sesudahnya. Sebagai contoh adalah Imam Hanafi. Pendiri Madzhab Hanafiyah ini dulu dikenal sebagai seorang pedagang sutera yang sukses.

Di Indonesia pun demikian pula adanya. Berdasarkan data sejarah, kelompok ulama yang menyiarkan ajaran Wahabi di Sumatera Barat yang disebut “Harimau Nan Salapan” dulunya adalah kelompok para pedagang. Contoh lain adalah KH. Ahmad Dahlan. Menurut sejarah, beliau mendapatkan ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah dengan dimensi pergerakan didalamnya disebabkan sering membaca majalah “*al-Urwah al-Wutsqa*” yang didapatkannya dari para pedagang Arab. Maka wajarlah jika kemudian KH. Ahmad Dahlan dengan para pedagang batik kaumannya Yogyakarta mendirikan persyarikatan Muhammadiyah dengan titik tumpu pada pembebasan kemiskinan umat (Madjid, 1995). Bahkan, dalam sejarah PERSIS (Persatuan Islam), tersebutlah bahwa A. Hassan mulai tertarik pada paham Wahabi dan kemudian menjadi seorang tokoh terkenal PERSIS, setelah mengikuti perkumpulan diskusi keislaman para pedagang yang didirikan oleh H. Zamzam (Mughni, 1980).

Begitulah, teladan para penda’i yang cukup unik. Uniknyanya, umat Islam seringkali menggunakan kesempatan berkomunikasi kepada orang lain untuk berda’wah dengan cara berdagang. Sejarah mengemukakan dengan jelas, bahwa Islam masuk ke Indonesia dilakukan melalui perdagangan. Dengan perdagangan akan membuka peluang diskusi yang “dialogis” ketimbang “pemaksaan kehendak.” Sebab, kedudukan penjual dan pembeli adalah sederajat. Maka, tidak heran jika Islam begitu mengakar secara kultural di bumi Indonesia ini.

Disebabkan derajat kemuliaan yang terkandung dalam kewirausahaan, yang mengandung indikasi kemandirian itulah, kemudian banyak pergerakan umat Islam untuk meraih kemerdekaan yang dirintis dan diperjuangkan oleh para pedagang. Contoh kasus di negeri ini adalah, kebangkitan umat Islam Indonesia—ada juga yang menyebutnya sebagai kebangkitan nasional Indonesia—melawan penjajah Belanda diawali oleh para pedagang yang tergabung dalam SDI (Serikat Dagang Islam) (Suryanegara, 2009).

Kemudian, tak henti-hentinya umat Islam berkiprah di lapangan ekonomi Indonesia dengan didirikannya lembaga-lembaga sosial yang menunjangnya seperti lembaga pendidikan (dari pesantren hingga perguruan tinggi), lembaga kesehatan seperti rumah sakit, lembaga da’wah, lembaga riset, sampai lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Rahardjo, 1996; Abdurrahman, 1995).

Maka, semangat politik ekonomi yang digariskan dalam sejarah Indonesia itu akan terus menggelora dalam benak dan gerakan ekonomi Islam di negeri ini. Terbukti, sekarang sudah banyak bermunculan bank-bank Islam, asuransi Islam, dan lain-lain, yang kemudian ditiru dan diadaptasi oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional.

D. Prospek Politik Islam

Politik Islam akan terus hidup di Indonesia, mengingat penduduknya yang tetap mayoritas beragama Islam. Dengan demikian, secara proporsional Islam akan selalu dapat perwakilan dalam panggung politik Indonesia. Adapun bentuk-bentuk perwujudannya akan terus berkembang mengikuti pola-pola zaman. Pada waktu zaman penjajahan Belanda, Islam muncul sebagai gerakan yang ikut menentukan kemerdekaan Indonesia dengan didirikannya organisasi-organisasi sosial dan politik seperti Sarikat Islam (SI), Sarikat Dagang Islam (SDI), dan organisasi-organisasi massa Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, PUI, dll.

Pada zaman Presiden Soekarno, Islam muncul sebagai ide-ide kebangsaan yang disuarakan oleh tokoh-tokoh seperti Muh. Yamin, M. Natsir, bahkan Soekarno itu sendiri. Pada zaman ini pula muncul organisasi-organisasi politik seperti Masyumi dan NU yang menampung aspirasi umat Islam. Namun, para elit dan organisasi-organisasi politik itu tidak memuaskan semua pihak. Islam muncul juga dalam bentuknya yang paling radikal, yaitu pemberontakan. Pada zaman ini

tercatat pemberontakan panjang DI/TII di berbagai daerah di Indonesia yang akan mendirikan Negara Islam Indonesia. Pada saat ini pula ada pemberontakan PRRI/Permesta yang didukung oleh Amerika Serikat (Kahin & Kahin, 1997).

Pada awal kepresidenan Soeharto, Islam seringkali dianggap sebagai kekuatan anti-modern (Barton, 2001). Program-program pembangunan seperti sekolah dan Keluarga Berencana (Birth Control) ditentang. Kebanyakan umat Islam lebih memilih menyekolahkan ke pesantren dan mempunyai banyak anak. Tetapi pada akhir zaman Soeharto, Islam nampak bergandengan tangan dengan proses modernisasi yang dikembangkan Indonesia dan ikut terlibat dalam proses pembangunan. Zaman ini menyaksikan bagaimana kondisi umat Islam yang asalnya terpinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tiba-tiba muncul ke "tengah-tengah kancah" perpolitikan Indonesia berupa banyaknya tokoh-tokoh politik, birokrat, dan intelektual dari kalangan Islam. Sehingga pada akhir hayatnya, Soeharto sendiri pun termasuk ikut dalam pendukung suara Islam.

Namun, rupanya kekuatan Islam sudah merasa terlanjur terpinggirkan. Tidak heran jika ada organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan Islam yang berperan penting dalam protes-protes dan demonstrasi-demonstrasi yang membawa pada kejatuhan rezim Soeharto (Rais, 1999). Terbukti dengan dukungan NU yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid dan Muhammadiyah yang dipimpin oleh Amien Rais dan ICMI yang dipimpin B.J. Habibie terhadap koalisi Anti-Soeharto (Mietzner, 1999).

Setelah zaman Soeharto, yaitu apa yang dinamakan zaman Reformasi, Islam muncul secara jelas dalam wajah dua presiden, yaitu B.J. Habibie (Ketua ICMI) dan K.H. Abdurrahman Wahid (Ketua NU), dan satu wakil presiden, yaitu M. Jusuf Kalla (aktivis HMI). Pada zaman ini Soesilo Bambang Yudhoyono (yang menjadi presiden selama dua periode, 2004-2014) pun mengaku bahwa partainya nasionalis-religius, dan memang beliau pun dekat dengan kalangan Islam.

Pada zaman Reformasi ini pula, dapat disaksikan hidupnya kembali partai-partai politik Islam, yang pada zaman Soeharto dulu tidak dapat hidup dengan alasan keamanan dan ketertiban. Di sini muncullah partai-partai seperti PAN (berbasis massa Muhammadiyah), PKB (berbasis massa NU), PBB (berbasis massa Masyumi), dan PKS (berbasis massa gerakan dakwah), di antara partai yang besar. Nampaklah bahwa Islam menunjukkan kembali pesonanya sebagai "tempat kembali" dalam lapangan politik.

Sudah tiga kali Pemilu dalam masa Reformasi, kekuatan partai Islam masih ada, walaupun jelas selalu ada di posisi tengah (*mediocre*).

Persaingan dan rivalitas pengaruh di panggung politik Indonesia telah memunculkan dinamika saling serang di antara partai-partai yang bertarung dalam Pemilu 2014. Sebelum Pemilu 2014 partai-partai Islam sudah mulai banyak dibenturkan dengan berbagai kesalahan, kekurangan, kelalaian, dan ketidak-amanahan mereka. Penelitian opini publik barangkali sudah dilakukan dan disimpulkan bahwa politik Islam mengalami kemunduran dari segi pendukungnya.

Memang, seringkali ketika pada saatnya Pemilu, politik identitas kembali muncul. Dan Islam akan selalu "hadir" dalam wujudnya yang sloganistik, penuh spirit, seperti yang digambarkan dalam doktrinnya tentang "jihad". Tetapi yang didambakan oleh umat adalah hal-hal yang melibatkan mereka sendiri. Dalam artian, demi kepentingan mereka sendiri. Politik adalah kepentingan. Fenomena kemenangan Joko Widodo dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu menunjukkan bahwa rakyat lebih memilih orang yang akan memperjuangkan kepentingan mereka daripada yang bersifat primordial kesukuan atau keagamaan.

Begitu pula, slogan politik "bersih" PKS telah mujarab menjadi "obat harapan" masyarakat akan adanya *clean government* di Indonesia, sehingga PKS menjadi partai Islam terkuat pada hari ini dengan adanya tiga orang Menteri dalam Kabinet Presiden SBY II. Kepercayaan masyarakat seperti ini harus tetap dipertahankan karena tercorengnya partai-partai Islam akan melemahkan kepercayaan umat dan pada gilirannya, melemahkan partai-partai Islam itu sendiri, dan imbas terakhirnya adalah melemahkan eksistensi Islam itu sendiri.

Kelompok penekan (*pressure group*) dari kalangan umat Islam seperti Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam nampaknya masih memberikan harapan "kesucian" dan "kemurnian" Islam karena tidak terlalu nampak kepentingan politik atau ekonomis mereka. Namun, nampaknya perlu

ada penyesuaian-penyesuaian dialogis di lapangan karena negara Indonesia itu sendiri bukanlah negara yang berdasar pada Syari'at Islam. Upaya-upaya aksi simpatik adalah alternatif yang lebih memuaskan dalam rangka menggapai hati rakyat, yang kepada merekalah Islam dida'wahkan dan diperlihatkan.

E. Kesimpulan

Politik identitas telah mewarnai perjalanan sejarah Islam di Indonesia, baik itu termanifestasi dalam politik kebangsaannya maupun dalam politik ekonominya sebagai wujud sekelompok primordial dan senasib sepenanggungan.

Politik kebangsaan Islam di Indonesia memang sangat aktif, yaitu sejak keterlibatannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, masa-masa revolusi, masa-masa pembangunan, dan masa-masa reformasi.

Politik ekonomi Islam juga sudah mulai wujud di bumi Indonesia dengan menjamurnya praktik-praktik perbankan dan asuransi Islam.

Politik Islam akan selalu membarengi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dikarenakan secara proporsional dalam baik dalam lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif umat Islam sudah mulai terwakili.

Namun, politik identitas saja nampaknya tidak cukup. Umat Islam harus sudah melakukan faktualisasi ajaran Islam ke dalam kehidupan politik seperti politik yang bersih (*clean politics*) dan pembelaan kepada rakyat kecil. Sebab fenomena kemenangan Jokowi sebagai gubernur di DKI Jakarta menunjukkan bukan identitas Islamnya yang ditonjolkan, melainkan pemihakannya kepada rakyat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Moeslim. 1995. *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*, Bandung: Benteng Pustaka.
- Barton, Greg. 2001. "The Prospects for Islam," in Grayson J. Lloyd and Shannon L. Smith (eds.). *Indonesia Today: Challenges of History*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Bruinessen, Martin van. 1995. *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat. Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. London: The Free Press & Glencoe.
- Hasan, Noorhaidi. 2006. *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Cornell, N.Y.: SEAP Cornell University.
- Hefner, Robert W. 1997. "Islamization and Democratization in Indonesia," in Robert W. Hefner and Patricia Horvatic (eds.). *Islam in an Era of Nation States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon and Schuster.
- Kahin, Audrey R. and Kahin, George McT., *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Lee, Robert D. 1997. *Overcoming Tradition and Modernity: the Search for Islamic Authenticity*, Westview Press.
- Madjid, Nurcholish. 1995. *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Mietzner, Marcus. 1999. "From Soeharto to Habibie: the Indonesia Armed Forces and Political Islam During the Transition," in Geoff Forrester (ed.). *Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos?* Leiden: KITLV.
- Mughni, Syafiq. 1980. *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahardjo, M. Dawam. 1996. *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan*

Muslim. Bandung: Mizan.

- Rais, Amien. 1999. "Islam and Politics in Contemporary Indonesia," in Geoff Forrester (ed.). *Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos?* Leiden: KITLV.
- Stanford Encyclopaedia of Philosophy*. 1997. Stanford: Stanford University.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 2009. *Api Sejarah*. Bandung: Salamadani.
- van Dijk, Kees. 1985. *Islam and Social Discontents in Indonesian History*. Leiden: KITLV.
- van Klinken, Gerry. 2001. "The Maluku Wars: Bringing Society Back In," in *Indonesia*, 71, pp. 1-26.
- Varikiotis, P. J. 1981. "Islamic Resurgence: A Critical View", dalam Alexander S. Cudsi dan Ali E. Hillal Dessouki (eds.), *Islam and Power*, London: Croom Helm.

